Peran *Platform Peer To Peer Lending* Atas Tanggung Jawab Pembebanan Jaminan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Kevin Monteverdi Siagian, Rika Ratna Permata dan Tasya Safiranita Ramli

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email korepondensi: kevinmonteverdi@gmail.com; permata_rika@yahoo.com;

tasya_safiranita@yahoo.com

ABSTRAK

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, telah menyebabkan masyarakat berkembang dalam segi pola pikir ataupun kreatifitas yang mendorong lahirnya kekayaan intelektual terutama hak cipta, perkembangan lahirnya hak cipta perlu juga diikuti oleh perlindungan hukum yang komprehensif melalui peraturan perundang-undangan, perlunya perlindungan hukum tersebut adalah untuk melindungi hak cipta yang memiliki nilai besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia, selain perkembangan masyarakat, Lembaga jasa keuangan juga berinovasi kearah digital, kini Lembaga jasa keuangan non-bank memiliki produk digital yaitu *platform P2P lending*. Dalam permohonan pinjaman pada *platform P2P lending* dapat dilakukan pembebanan objek jaminan, dengan tingginya perkembangan dan berharganya hak cipta, oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan objek jaminan dalam melakukan pinjaman pada *platform P2P lending* melalui jaminan fidusia. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelusuri dan menjelaskan substansi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama belum adanya perlindungan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam *platform P2P lending* secara khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta ataupun POJK 77/2016, kedua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mencakup peran dan pertanggungjawaban penyelenggara apabila terjadi wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi *lender* sebagai pemberi kuasa. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang mengatur terkait pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia pada *platform P2P lending* dan juga peran penyelenggara sebagai penerima kuasa dari *lender* dalam mengembalikan pituang yang dimiliki *lender*, serta pelaksanaan penggunaan objek jaminan kebendaan dalam permohonan pinjaman pada *platform P2P lending* di Indonesia.

Kata Kunci: Hak Cipta; *Platform peer to peer lending*; Jaminan Fidusia; Surat Kuasa; Peran dan Tanggung Jawab.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang, tentunya memiliki banyak sekali sumber daya manusia yang dapat memajukan perekonomian Indonesia, manusia yang semakin hari semakin kreatif juga menyebabkan perkembangan usaha kecil ataupun menengah dalam industri kreatif. Industri yang bergerak dalam bidang industri kreatif sangat memanfaatkan kemampuan kreatifitas serta keterampilan individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan daya kreasi dan daya cipta individu. Industri kreatif juga mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan sumber daya buatan berupa ide dan kreatifitas dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan pengembangan industry kreatif tersebut. (Sulasi Rongiyati, 2008, p. 14).

Kreatifitas dari individu tersebut dinamakan sebuah kekayaan intelektual, kekayaan intelektual pada dasarnya berhubungan dengan penerapan ide dan kreasi seseorang yang memiliki nilai ekonomi atau komersial (Tim Lindsey, 2011, p. 3). Suatu kekayaan intelektual adalah hak diberikan kepada negara ataupun seorang *creator*, *inventor*, atau pendesain atas suatu kreativitas yang memiliki nilai ekonomi serta secara otomatis atau melalui suatu pendaftaran yang sesuai dengan perlindungan hukumnya karena kekayaan intelektual sebagai dasar dari perekonomian. (Ferry G.C, 2020, p. 340). Perkembangan kekayaan intelektual dewasa ini juga dipengaruhi oleh peningkatan perkembangan teknologi informasi pada saat ini, teknologi informasi yang berkembang ditandai dengan penggunaan internet yang tinggi (Abdul H. B, 2005, p. 1). Perkembangan tersebut menyebabkan para pelaku bisnis menggunakan teknologi informasi sebagai wadah mereka untuk memperoleh modal yang berfungsi untuk mengembangkan industrinya.

Manfaat dari perkembangan teknologi tersebut tidak hanya untuk masyarakat saja namun juga memberikan inovasi terhadap Lembaga jasa keuangan yang tadinya konvensional menjadi modern ditunjukkan dengan lahirnya lembaga jasa keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology* (Neni S. I, 2010, p. 2) produk-produk dari *financial technology* salah satunya adalah *peer to peer lending* (P2P Lending). P2P Lending adalah sebuah *platform* yang dapat digunakan oleh masyarakat ataupun pelaku bisnis untuk melakukan pemberian pinjaman dan penerimaan pinjaman, dalam praktiknya *platform* P2P lending ini adalah sebagai perantara atau penghubung antara penerima pinjaman (Borrower) dan pemberi pinjaman (Lender), dengan adanya *platform* P2P lending maka industri kreatif dapat mendapatkan modal untuk mengembangkan bisnisnya secara lebih mudah.

Industri kreatif yang memiliki kekayaan intelektual dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya dengan menggunakan hak ekonomi yang dimiliki oleh kekayaan intelektual, salah satunya adalah hak cipta, dalam hak cipta terdapat hak moral serta hak ekonomi yang dapat digunakan oleh pencipta untuk keuntungan dirinya. Hak ekonomi adalah salah satu hal yang mengakibatkan hak cipta menjadi berharga dan dapat dijadikan sebuah objek jaminan fidusia yang mana hal tersebut diakomodir dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) selain memiliki nilai ekonomi hak cipta juga dikatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam pasal 16 ayat (1) UU HC, yang mana hal tersebut merupakan dasar dari dapat dijadikannya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. (Iswi H, 2018, p. 126).

Untuk menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, maka perlu dilakukan valuasi terhadap hak cipta tersebut agar dapat diketahui berapa *value* dari hak cipta tersebut, namun terdapat kesulitan dalam melakukan valuasi hak cipta tersebut, karena hak cipta merupakan benda bergerak dan tidak berwujud. Berlandaskan pasal 16 UU HC seharusnya para pelaku bisnis dalam industri kreatif dapat memaksimalkan hak cipta yang dimiliki untuk mendapatkan pinjaman dalam *platform* P2P lending

Namun dalam UU HC dan UU JF pengaturan mengenai penjaminan hak cipta belum diatur secara khusus, ditambah lagi belum adanya praktik penjaminan kebendaan terutama hak cipta dalam *platform* P2P lending menyebabkan sulitnya bagi para calon *borrower* yang ingin mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminannya. Pengaturan tentang P2P lending juga hanya diatur didalam POJK 77/2016, belum ada Undang-Undang yang mengatur terkait P2P, dalam POJK 77/2016 juga tidak diatur secara rinci terkait pembebanan jaminan.

Permasalahan lainnya adalah apabila dalam proses pembebanan jaminan hak cipta dalam *platform* P2P lending ini terdapat wanprestasi dan menyebabkan kerugian bagi *lender*, oleh karena itu perlu dikaji sejauh apa peran dan tanggung jawab penyelenggara dalam memulihkan hak hak yang dimiliki para *lender* dan dalam penyelenggaraan *platform* P2P lending ini hak

cipta sebagai objek jaminan perlu dilindungi oleh penyelenggara dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait hak cipta serta jaminan fidusia, pengaturan mengenai penyelenggaraan *platform P2P lending* ini diatur di dalam UU ITE dan PP PSTE dan juga SE Menkominfo 5/ 2016.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif (*normative legal research*) yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka primer dan juga data sekunder, yang mana pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normative (*statute approach*) yang sifatnya deskriptif analitis (Soerjono Soekanto, 2003, p. 13). Oleh karena itu dalam Penulisan ini, penulis akan mendasarkan analisa melalui analisis peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu perlindungan hukum atas pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan dan juga peran serta tanggung jawab penyelenggara dalam proses pebebanan jaminan hak cipta dalam *platform P2P lending*. Analisis yang difokuskan pada penulisan ini adalah terkait dengan perkembangan masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan kekayaan intelektual seperti hak cipta dan dibutuhkan modal dalam industry kreatif melalui layanan pinjaman *P2P lending*. Selanjutnya pada penulisan ini. Penulis juga menggunakan data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer yaitu UU HC, UU ITE, UU JF, PP PSTE, dan POJK 77/2016, dan hukum sekunder yaitu literatur hukum dan sumber bacaan hukum lainnya yang dapat menunjang penulisan ini. Pengumpulan data yang penulis lakukan merupakan pengambilan data melalui studi dokumen baik terhadap dokumen seperti buku dan jurnal maupun tugas akhir, serta dokumen yang didapatkan secara *online* atau wawancara. Lalu mengenai metode analisis data yang penulis gunakan adalah dengan cara melakukan riset terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menganalisa pokok permasalahanyang terdapat dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Atas Pembebanan Jaminan Hak Cipta Dalam Peran *Platform Peer To Peer Lending* Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi berjalan lurus dengan perkembangan masyarakat Indonesia, kemampuan berpikir serta kreatifitas ataupun ide-ide yang dimiliki masyarakat juga mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kreatifitas ataupun ide merupakan sesuatu yang bernilai. Sistem ekonomi tradisional kini juga banyak mengalami inovasi kearah digital dengan menggunakan system informasi, hak cipta merupakan hak yang dilindungi oleh negara melalui UU HC. Berdasarkan UU HC (OK. Saidin, 2019, p. 199), hak cipta dikatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa hak cipta merupakan suatu hak eksklusif yang dimiliki pencipta setelah suatu ciptaan tersebut di publikasikan atau diwujudkan dalam bentuk nyata, hak eksklusif pada suatu hak cipta berdasarkan Pasal 4 UU HC terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, hak moral adalah hak yang dimiliki pencipta untuk dicantumkan Namanya dalam seluruh ciptaannya apabila digunakan oleh pihak lain serta hak moral tidak dapat dihapuskan dari diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak pencipta untuk memonetisasi atau memanfaatkan hak cipta miliknya untuk kepentingan ekonomi. Pelindungan

terhadap hak ekonomi tersebut dikarenakan kekayaan intelektual termasuk ke dalam benda yang memiliki suatu manfaat ekonomi yang besar, oleh karena itu pada hak cipta terdapat perlindungan hak ekonomi (Gatot, 2010, p. 45). Pengaturan hak ekonomi tersebut terdapat dalam pasal 9 UU HC.

Hak ekonomi yang dimiliki pencipta dapat dialihkan sesuai dalam pasal 16 ayat (2) UU HC yang mengatakan bahwa hak ekonomi pencipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun Sebagian karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “

Perjanjian tertulis merupakan salah satu dapat dialihkannya hak ekonomi dari hak cipta, yang mana dalam ayat selanjutnya yaitu ayat (3) dikatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sesuai dengan definisi dari jaminan fidusia dalam UU JF hak cipta telah terkualifikasi dalam definisi tersebut karena objek yang dapat dijadikan jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud berdasarkan definisi jaminan fidusia dalam UU JF. Pembebanan jaminan fidusia dapat dilakukan oleh siapapun melalui notaris, objek yang akan dijadikan jaminan fidusia harus terdaftar, oleh karena itu hak cipta walaupun prinsipnya terlindungi secara otomatis namun harus tetap dilakukan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun pada praktiknya masih belum banyak Lembaga jasa keuangan perbankan maupun non-bank yang menerima kekayaan intelektual sebagai objek jaminan.

Pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia memang diatur didalam UU HC namun hal tersebut masih terbilang sangat umum, karena dalam UU HC hanya dikatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia namun tidak diatur secara lebih khusus mengenai apa saja yang dapat dijadikan jaminan dan juga bagaimana cara menilai hak cipta. Pengaturan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan yakni UU JF. Namun UU JF juga hanya mengatur mengenai pembebanan jaminan fidusia secara umum tidak terkhusus untuk kekayaan intelektual ataupun hak cipta. Bagaimanapun pembebanan jaminan fidusia tetap dapat dilakukan terhadap hak cipta karena hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud serta memiliki nilai ekonomi dan telah sesuai dengan syarat objek yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Penggunaan objek jaminan fidusia dapat digunakan untuk perjanjian kredit, karena fungsi dari jaminan sendiri adalah sebagai penjamin dari kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak, dan apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan maka jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban tersebut (Subekti, 1979, p. 1). Perjanjian kredit sekarang dapat dilakukan dengan Lembaga jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi sebagai system mereka untuk menjalankan jasa keuangan tersebut, hal ini disebut sebagai financial technology (fintech) atau dalam Bahasa Indonesia adalah penggunaan teknologi dalam system keuangan. Fintech memiliki banyak bentuk mulai dari pembayaran, investasi, pembiayaan, asuransi, serta infrastruktur. Salah satu produk dari fintech adalah P2P lending. Produk ini berguna untuk memberikan pinjaman atau menerima pinjaman dari orang lain secara online dengan menggunakan jasa penyelenggara atau platform sebagai perantara antara pemberi pinjaman serta penerima pinjaman

Proses perjanjian kredit antara penyelenggara, lender, dan borrower di ikat oleh dua perjanjian yaitu perjanjian antara penyelenggara dengan lender dan lender dengan borrower. perjanjian antara penyelenggara dan lender merupakan perjanjian keanggotaan serta perjanjian

pemberian kuasa kepada penyelenggara untuk melakukan hak yang dimiliki oleh lender dengan mengatasnamakan lender. Dengan kata lain penyelenggara lah yang nanti akan melaksanakan perjanjian pemberian pinjaman kepada borrower dengan mengatasnamakan lender melalui surat kuasa tersebut. Selanjutnya, perjanjian antara borrower dan lender yang mana dalam hal ini di wakikan oleh penyelenggara mewajibkan adanya klausul objek jaminan apabila borrower memberikan sebuah jaminan, jaminan tersebut dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan karena dalam POJK 77/2016 juga tidak diatur secara khusus mengenai objek jaminan yang dapat dijadikan sebuah objek jaminan.

Borrower sebagai pencipta serta pemilik hak cipta wajib mendaftarkan hak cipta tersebut agar bukti kepemilikan atas hak cipta tersebut jelas, selain itu hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan perlu juga di valuasi oleh pihak yang mampu melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual terutama hak cipta, namun pada praktiknya melakukan valuasi terhadap hak cipta sangat sulit karena pada dasarnya hak cipta merupakan sebuah benda yang tidak berwujud. Sulitnya valuasi nilai dari hak ekonomi dalam hak cipta ini adalah salah satu penyebab sulitnya menerima hak cipta sebagai objek jaminan dalam permohonan pinjaman. UU HC sendiri belum menaungi dan mengatur bagaimana cara melakukan valuasi terhadap hak ekonomi dari hak cipta yang akan dijadikan objek jaminan fidusia.

Pembebanan jaminan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam platform P2P lending dilakukan oleh borrower sebagai pemilik hak cipta dan juga penyelenggara sebagai penerima kuasa dari lender. Perjanjian untuk membebankan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilakukan dihadapan notaris untuk didaftarkan dan mendapatkan sertifikat fidusia, borrower yang menjadikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tersebut masih dapat menggunakan hak cipta miliknya terlebih hak ekonomi atas ciptaan miliknya, apabila hak cipta tersebut adalah sumber pendapatan dari borrower maka hal tersebut masih tetap dapat dilakukan dan tetap dilindungi oleh UU HC sampai hapusnya jaminan fidusia dan hak cipta tersebut dialihkan, karena sesuai pasal 1 ayat 1 UU JF fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Hak cipta dari pencipta yakni borrower akan terus dilindungi oleh negara melewati UU HC dan akan tetap menjadi milik borrower selama proses penjaminan fidusia hingga terdapat pengalihan hak ekonomi atas hak cipta tersebut, perlu diketahui bahwa hak cipta yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia hanyalah hak ekonominya, hak ekonomi dapat dialihkan secara keseluruhan ataupun sebagian saja, hal ini berimplikasi terhadap kepemilikan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta, dalam pasal 17 ayat (1) UU HC dikatakan bahwa:

“Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.”

Berdasarkan pasal diatas, dapat diketahui bahwa hak ekonomi dari suatu ciptaan akan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta apabila pengalihan hak cipta tersebut hanya dilakukan sebagian saja tidak secara keseluruhan, pengalihan hak ekonomi secara sebagian ataupun secara keseluruhan merupakan hak dari pencipta untuk memilih kedua hal tersebut. Lender sebagai penerima jaminan fidusia yang diwakikan oleh penyelenggara tidak berhak atas hak cipta tersebut, entah melakukan hak ekonomi yang terdapat dalam hak cipta tersebut ataupun melakukan eksekusi terhadap hak cipta tersebut selama belum berakhirnya atau hapusnya jaminan fidusia, dalam praktiknya penyelenggara yang akan menguasai akta jaminan fidusia yang didaftarkan dengan atas nama lender sebagai penerima jaminan dan borrower sebagai pemberijaminan. Tidak terlepas dari pasal 18 UU HC yang berbunyi:

“Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”

Ciptaan yang dijadikan objek jaminan dan mengalami eksekusi serta hak ekonominya dialihkan dalam perjanjian jual putus yang dilakukan oleh penerima jaminan dengan melalui pelelangan ataupun jual beli bawah tangan, maka hak ekonomi dari pencipta tersebut berdasarkan pasal 18 UU HC diatas akan beralih Kembali kepada pencipta pada saat perjanjian jual putus tersebut telah mencapai jangka waktu 25 tahun. Dapat disimpulkan bahwa hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia pada *platform peer to peer lending* tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam UU HC.

Berdasarkan analisis diatas, UU HC sebagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hak cipta hanya menjelaskan secara umum terkait hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, penulis melihat bahwa UU HC belum melindungi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia secara menyeluruh dan komprehensif, karena dalam pasal 16 ayat (4) dikatakan bahwa pengaturan terkait pembebanan hak cipta sebagai jaminan fidusia dilaksanakan melalui peraturan perundang-undangan, yang mana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia adalah UU JF, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum karena apabila hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia, UU HC tidak mengatur mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia secara menyeluruh, sebagai benda bergerak tidak berwujud, hak cipta apabila dijadikan objek jaminan fidusia memiliki kesulitan dalam dilakukannya penilaian, UU HC dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak mengatur mengenai penilaian hak cipta seperti apa, dan juga apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjaman dengan menggunakan hak cipta sebagai objek jaminan. UU HC tidak mengatur mengenai eksekusi jaminan hak cipta tersebut, karena pengaturan terkait pembebanan jaminan fidusia dilakukan melalui UU JF, terlebih lagi dalam penelitian dilakukan penulis adalah pembebanan jaminan hak cipta dalam *platform peer to peer lending* melalui jaminan fidusia, *platform peer to peer* sendiri belum diatur oleh peraturan setingkat undang-undang untuk layanan pinjaman meminjam berbasis teknologi hanya diatur oleh POJK 77/2016, yang mana dalam POJK tersebut juga tidak diatur mengenai pembebanan objek jaminan, terlebih lagi objek jaminan hak cipta. Karena dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan juga kekayaan intelektual maka diperlukan pembaharuan UU HC terkait hak cipta sebagai objek jaminan fidusia secara lebih komprehensif dan menyeluruh demi tercapainya kepastian hukum akan perlindungan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, yang mana kepastian hukum tersebut akan mencapai keadilan dan memajukan perekonomian masyarakat intelektual dalam konteks penggunaan hak ekonomi yang dimiliki pencipta serta tercapainya fungsi hukum yang prediktif dan antisipatif sebagaimana tujuan hukum untuk pembangunan sebagaimana pendapat Mochtar Kusumaatmadja.

Peran dan Tanggung Jawab Hukum Platform Peer To Peer Lending Atas Jaminan Hak Cipta Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia.

Konsep tanggung jawab berkaitan dengan hak suatu individu dan kewajiban individu lain (Satjipto, 2000, p. 53). Dalam kamus hukum, terdapat istilah responsibility yang merupakan suatu tanggung jawab dalam kaitannya memikul suatu beban (Zainal, 2016, p. 52). Suatu subjek hukum diharuskan bertanggungjawab terhadap suatu akibat yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam melakukan kewajiban hukumnya. Kemudian subjek hukum dapat dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengemban tanggung jawab yang memiliki sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Hans Kelsen, 2008, p. 31).

Perkembangan teknologi memiliki dampak bagi Lembaga jasa keuangan dalam melakukan inovasi, hasil dari inovasi tersebut salah satunya adalah jasa keuangan yang berbasis teknologi yaitu *platform P2P lending*. *Platform P2Plending* merupakan sebuah *platform* yang memiliki fungsi untuk menjadi wadah atau perantara dalam pemberian kredit atau penerimaan kredit antara kreditur dan debitur. Penyelenggara ataupun *platform* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan(OJK), hal ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(POJK 77/2016). Hal ini merupakan hal yang penting karena apabila penyelenggara telah mendapatkan izin dan tersertifikasi maka akan lebih mudah bagi *borrower* ataupun *lender* dalam mempercayai dan menggunakan jasa penyelenggara tersebut. Sertifikasi tersebut juga berfungsi agar penyelenggara tersebut diawasi oleh OJK yang mana menyebabkan *platform* tersebut lebih aman dibandingkan *platform* lainnya yang tidak terdaftar dan tersertifikasi oleh OJK.

Penyelenggara system elektronik memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang diatur dalam pasal 15 UU ITE yang berbunyi:

- (1) *“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*
- (2) *Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.*
- (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak Pengguna Sistem Elektronik”*
dasar

Berdasarkan pasal 15 UU ITE tersebut maka dapat diketahui bahwa platform P2P lending sebagai penyelenggara system elektronik harus menyelenggarakan system elektroniknya secara aman dan andal, namun apabila terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan system elektronik tersebut berdasarkan ayat 3 diatas, platform P2P lending tidak bertanggung jawab apabila terdapat keadaan memaksa atau terdapat kelalaian dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh pengguna system elektronik, yaitu lender dan borrower.

Pembatasan tanggung jawab yang dimiliki oleh penyelenggara system elektronik seperti platform P2P lending ini juga diatur dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content (SE Menkominfo 5/2016), pada dasarnya pembatasan tersebut sama seperti yang ada didalam pasal 15 UU ITE. Dalam pelaksanaannya, Platform P2P lending seperti Investree juga terdapat pelepasan tanggung jawab atau disclaimer dalam Terms of Condition yang disepakati sebelumnya pada saat mendaftarkan diri untuk menggunakan jasa platform P2P lending tersebut.

Dalam proses perjanjian pinjam meminjam dalam platform peer to peer lending yaitu Investree, Investree menggunakan perjanjian pemberian kuasa dari lender kepada penyelenggara agar penyelenggara dapat melakukan hak-hak yang dimiliki oleh lender. Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan terhadap Investree dan Dhia Novita Adristi, Investree memiliki hak penuh atas wewenang dan hak yang dimiliki pemberi kuasa, dan surat kuasa ini tidak bisa dicabut hingga proses perjanjian pinjam meminjam berakhir. Perjanjian pemberian kuasa ini tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), pada buku ketiga tentang perikatan serta dalam bab XVI tentang pemberian kuasa. Pada dasarnya semua ketentuan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh penyelenggara sebagai penerima kuasa telah diatur dalam perjanjian pemberian kuasa antara lender dengan

penyelenggara, namun penyelenggara harus tetap mematuhi apa yang telah diamanatkan juga didalam KUHPer terkait tanggung jawab serta kewajiban penerima kuasa.

Perjanjian pinjam meminjam tidak akan pernah lepas dari resiko terjadinya wanprestasi ataupun gagal bayar. Resiko ini akan tetap selalu ada didalam perjanjian pinjam meminjam dimanapun karena tidak ada yang pernah tau apabila dikemudian hari terjadi force majeure atau meninggalnya debitur dan hal lainnya yang menyebabkan tidak dibayarkannya hutang oleh debitur. Oleh karena itu penyelenggara system elektronik seperti Investree harus melakukan mitigasi resiko atas hal hal yang dapat merugikan pengguna, kewajiban ini juga diatur dalam pasal 21 POJK 77/2016. Mitigasi resiko yang dilakukan oleh Investree salah satunya adalah credit scoring dari borrower, credit scoring tersebut berasal dari Analisis tim Investree terhadap profil borrower tersebut, dari segi model bisnis, track record borrower dalam membayar hutang sebelumnya, dan juga objek jaminan yang dijaminan oleh borrower. namun pada dasarnya mitigasi resiko hanyalah sebuah sarana untuk mengurangi terjadinya resiko resiko yang sebelumnya penulis katakan, credit score dari borrower juga belum tentu merefleksikan karakter borrower secara utuh Apabila terjadi wanprestasi atau gagal bayar yang dilakukan oleh borrower maka pada dasarnya hal tersebut bukanlah tanggung jawab dari penyelenggara dalam hal memenuhi atau ganti rugi kepada lender, karena hal tersebut merupakan bagian dari pembatasan tanggung jawab penyelenggara system elektronik, namun tanggung jawab tersebut akan hilang apabila dibuktikan bahwa kesalahan yang menimbulkan kerugian tersebut diakibatkan oleh borrower.

Namun, sebagaimana diatur dalam perjanjian surat kuasa antara lender dan penyelenggara, penyelenggara memiliki kewajiban untuk melakukan hak hak yang dimiliki oleh lender, hak-hak tersebut antara lain adalah untuk mendapatkan pinjaman yang diberikan kepada borrower Kembali. Dalam huruf e perjanjian pemberian kuasa Nomor: 001/KPMI/26/2020 dikatakan bahwa Investree selaku penerima kuasa berhak untuk melakukan hal ini “setelah terjadinya peristiwa cidera janji (event of default) berkelanjutan, untuk melakukan tindakan yang diperlukan termasuk namun tidak terbatas pada (i) menghubungi Penerima Pinjaman (ii) menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan atas segala yang terutang dan telah melewati tanggal jatuh tempo.” Hal inilah yang menjadi tanggung jawab dari penyelenggara dalam berperan untuk mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh lender.

Apabila borrower telah menjaminkan hak cipta sebagai objek jaminannya dalam memohonkan pinjaman, maka berdasarkan perjanjian jaminan fidusia didepan hadapan notaris, sesuai dengan pasal 15 UU JF bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” kata-kata tersebut memiliki makna bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila debitur yang dalam platform peer to peer lending disebut sebagai borrower cidera janji atau tidak melaksanakan kewajibannya maka lender sebagai penerima fidusia yang diwakilkan oleh penyelenggara mempunyai hak untuk menjual benda yang dijadikan objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri, setelah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU/XVII/2019, pasal 15 tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditu dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji (Syafriada, 2019, p. 118).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyelenggara sebagai penerima fidusia dari borrower harus menyertakan klausul terkait cidera janji dalam perjanjian pinjam meminjam antara lender dan borrower, hal ini berfungsi agar proses eksekusi jaminan hak cipta apabila terjadi cidera janji tidak memakan waktu dan biaya yang lebih besar karena dilakukannya parate eksekusi. Proses eksekusi ini dapat dilakukan melalui pelelangan ataupun penjualan

bawah tangan untuk melunasi hutang yang dimiliki oleh borrower. selain itu penyelenggara berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh penyelenggara dan lender memiliki kewajiban untuk melakukan hak hak yang diberikan oleh lender, pada dasarnya perjanjian pemberian kuasa tunduk kepada pasal 1338 KUHPer yang mana dikatakan bahwa setiap perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Oleh karena segala perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus dilakukan karena telah mengikat. Oleh karena itu penyelenggara sebagai penerima kuasa dari lender memiliki kewajiban hukum atas peran dalam proses pengembalian hak hak yang dimiliki lender melalui tindakan-tindakan ataupun upaya hukum yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian antara penyelenggara dan lender, dan juga pengeksekusian objek jaminan hak cipta apabila borrower melakukan wanprestasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pelindungan hukum atas Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang di akomodir dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara komprehensif karena pengaturan tersebut hanya mengatur secara umum, pembebanan jaminan hak cipta di dalam *platform P2P lending* juga belum memiliki peraturan yang mengatur secara langsung, oleh karena itu diperlukan pembaharuan UU HC atau peraturan khusus yang mengatur pembebanan jaminan hak cipta didalam *platform peer to peer lending* untuk mencapai fungsi hukum yang prediktif dan antisipatif.
2. *Platform P2P lending* sebagai penyelenggara system elektronik memiliki tanggung jawab atas keandalan dan keamanan system informasi miliknya namun tidak bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan pengguna sebagaimana diatur dalam UU ITE, namun dalam *platform P2P lending* penyelenggara sebagai penerima jaminan fidusia yang mewakili *lender* bertanggung jawab atas pengembalian piutang *lender* melalui eksekusi jaminan hak cipta yang diberikan oleh *borrower* apabila terjadi wanprestasi atau kredit macet sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan *lender* dan penyelenggara.

Saran

1. Diperlukan suatu pengaturan terkait pembebanan jaminan hak cipta melalui jaminan fidusia secara lebih khusus, selain itu diperlukan pengaturan pula terkait hak cipta sebagai objek jaminan dalam permohonan pinjaman pada *platform peer to peer lending* dan diperlukan pembentukan Lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan valuasi secara menyeluruh untuk seluruh rezim kekayaan intelektual. Dan pembaharuan UU JF dalam mengatur pembebanan jaminan benda bergerak tidak berwujud seperti kekayaan intelektual.
2. Diperlukan adanya sebuah sosialisasi ataupun praktik pada *platform peer to peer lending* dalam memberikan sebuah objek jaminan kebendaan terutama objek jaminan hak cipta melalui skema fidusia agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana system pemberian jaminan dalam *platform peer to peer lending* dengan cara membebankan hak cipta sebagai objek jaminan melalui jaminan fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Ferry Gunawan Christy dkk, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Indonesia Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 1., 2020
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Iswi Hariyani, Dr. Cita Yustisia S, R. Serfianto D. Purnomo, *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, terjemahan: Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Reike Aditama, 2010.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI press, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1979.
- Sulasi Rongiyati, "Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Pada Produk Ekonomi Kreatif", *Jurnal Negara Hukum*, Volume 9(1), 2008.
- Syafrida, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019", *Jurnal Hukum Vol. 11 No. 1*.
- Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; PT. Alumni, 2011.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.